



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 700/Kep.1274–Insp/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di maksud;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, maka perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan obyek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT** : Jadwal dan obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon serta berdasarkan kewenangan yang ada.

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 700/Kep.25-Insp/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
pada Tanggal : 28 Desember 2017



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Yth. Camat se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 1274–Insp/2017

TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN  
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan diLingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diLingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan pada Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan
2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja;
3. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
4. Kegiatan reviu;
5. Kegiatan evaluasi; dan
6. Kegiatan pengawasan lainnya.

## II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 berdasarkan hasil analisis risiko.

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditi yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim
2. Menyusun daftar obyek pemeriksa
3. Mengidentifikasi faktor risiko
4. Menetapkan bobot/ besaran risiko atas seluruh auditi  
Setiap auditi ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.  
Besaran risiko auditi dirumuskan dengan meminta masukan dari auditi, dan jika auditi memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.  
Penetapan besaran risiko tiap auditi dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
5. Menentukan tingkat risiko
6. Menetapkan jenis pengawasan, dilengkapi dengan peta audit yang meliputi auditi, besaran risiko, tingkat Risiko, tenaga auditor, tenaga tata usaha, dukungan dana serta sarana dan prasarana.

### B. Pelaksanaan

#### 1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:

- Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Pemberian layanan konsultasi;
- Pembinaan dalam pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- Pembinaan dalam rangka pelaporan gratifikasi.

## 2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Meliputi beberapa aspek:

- Kebijakan
- Kelembagaan
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Pengelolaan Keuangan
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pencapaian Indeks Pelayanan Minimal

## 3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Penyalahgunaan wewenang;
- Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- Pelanggaran disiplin pegawai.

## 4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- Reviu dokumen perencanaan/RKA-SKPD;
- Reviu laporan keuangan; dan
- Reviu laporan kinerja instansi pemerintah.

## 5. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- Evaluasi revormasi birokrasi;
- Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

## 6. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Layanan Jasa Konsultasi

### C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan reviu secara berjenjang.
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Cirebon.
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah.

### III. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Jadwal Program Pengawasan Tahunan (PKPT)  
Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018



JADUAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>I. Audit Operasional / Audit Kinerja</b>																					
1	UPT PUSKESMAS MUNDU													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku	1. Tugas dan Fungsi	1. Tata Kelola Keuangan	252,50	- Merupakan SKPD yang	1. Desk Audit/	7	6
2	UPT PUSKESMAS PLUMBON														2. Pengelolaan Keuangan	2. Tata Kelola Aset	245,00	memiliki Program Unggulan	Pemeriksaan Dokumen	7	6
3	UPT PUSKESMAS GEBANG														3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	3. Pengadaan Barang Jasa	245,00	Kepala Daerah, yaitu Cirebon	2. Wawancara Klarifikasi	7	6
4	UPT PUSKESMAS LOSARI													2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E)	4. Pengelolaan Aparatur	4. Tata Kelola Pegawai	245,00	Gratis Pelayanan Kesehatan	3. Analisa data	7	6
5	UPT PUSKESMAS KAMARANG													Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern			245,00	Bagi warga Miskin/Cirebon	4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	7	6
6	UPT PUSKESMAS ASTANAJAPURA													3. (SPI) telah berjalan			237,50	bebas balita Gizi Buruk/Cirebon		7	6
7	UPT PUSKESMAS WARUROYOM													4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindakanlanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP			230,00	Gratis pelayanan jaminan		7	6
8	UPT PUSKESMAS KEDATON													5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas			215,00	Persalinan/Cirebon Sehat		7	6
9	UPT PUSKESMAS SINDANGLAUT																215,00			7	6
10	UPT PUSKESMAS BEBER																210,00			7	6
11	UPT PUSKESMAS TALUN																207,50			7	6
12	UPT PUSKESMAS KALIWEDI																207,50			7	6
13	UPT PUSKESMAS KARANGSARI																207,50			7	6
14	UPT PUSKESMAS BABAKAN																207,50			7	6
15	UPT PUSKESMAS SURANENGGALA																207,50			7	6
16	UPT PUSKESMAS PLERED																207,50			7	6
17	UPT PUSKESMAS GEMPOL																207,50			7	6
18	UPT PUSKESMAS WANGUNHARJA																207,50			7	6
19	UPT PUSKESMAS CIBOGO																207,50			7	6
20	UPT PUSKESMAS SUSUKANLEBAK																207,50			7	6
21	UPT PUSKESMAS KLANGENAN																200,00			7	6
22	UPT PUSKESMAS PALIMANAN																200,00			7	6
23	UPT PUSKESMAS WATUBELAH																200,00			7	6
24	UPT PUSKESMAS CILEDUG																200,00			7	6
25	UPT PUSKESMAS GEGESIK																200,00			7	6
26	UPT PUSKESMAS DUKUPUNTANG																200,00			7	6
27	UPT PUSKESMAS PANGENAN																200,00			7	6
28	UPT PUSKESMAS KARANGSEMBUNG																200,00			7	6
29	UPT PUSKESMAS SEDONG																200,00			7	6
30	UPT PUSKESMAS SUSUKAN																195,00			7	6
31	UPT PUSKESMAS JEMARAS																195,00			7	6
32	UPT PUSKESMAS PASALEMAN																187,50			7	6
33	UPT PUSKESMAS TEGALGUBUG																187,50			7	6
34	UPT PUSKESMAS GUNUNG JATI																187,50			7	6
35	UPT PUSKESMAS PABUARAN																187,50			7	6
36	UPT PUSKESMAS WINONG																187,50			7	6



NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
37	Desa-Desa di Kabupaten Cirebon													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindakanjurt Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	- Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Desa	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	- Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Berhotmix, Mulus dan Bebas banjir	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	7	5
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindakanjurt Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	252,50 - Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Berhotmix, Mulus dan Bebas banjir	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
39	RSUD WALED													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindakanjurt Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	252,50 - Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Gratis Pelayanan Kesehatan Bagi warga Miskin/Cirebon bebas balita Gizi Buruk/Cirebon Gratis pelayanan jaminan Persalinan/Cirebon Sehat	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
40	DINAS KESEHATAN													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindakanjurt Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	235,00 - Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Gratis Pelayanan Kesehatan Bagi warga Miskin/Cirebon bebas balita Gizi Buruk/Cirebon Gratis pelayanan jaminan Persalinan/Cirebon Sehat	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
41	DINAS PENDIDIKAN													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	230,00	- Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Bebas Biaya Pendidikan dan Bebas Putus Sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah/Pendidikan Dasar dan Menengah untuk semua	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
42	RSUD ARJAWINANGUN													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	230,00	- Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Gratis Pelayanan Kesehatan Bagi warga Miskin/Cirebon bebas balita Gizi Buruk/Cirebon Gratis pelayanan jaminan Persalinan/Cirebon Sehat	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
43	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	185,00	- Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Kampung Wirausaha	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
44	DINAS PERTANIAN													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	180,00	- Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Klinik Agribisnis Bagi Petani	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
45	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	177,50	- Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau dan Cirebon Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
46	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	175,00	- Risiko terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
47	DINAS PERHUBUNGAN													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	172,50	- Risiko terkait Pengendalian Lalu Lintas dan angkutan serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
48	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	172,50	- Risiko terkait Pengendalian Lalu Lintas dan angkutan serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
49	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	167,50	- Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Kreasi Seni, Berbudaya dan Dimensi Destinasi Wisata	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	165,00	- Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Bersih, Asri dan Lestari	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
51	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	157,50	- Risiko terkait sebagai SKPD yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
52	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	152,50	- Risiko terkait Pengembangan Karir, Pendayagunaan Aparatur	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	152,50 - Risiko terkait Pengembangan Karir, Pendencygunaan Aparatur	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
<b>II. Pemeriksaan Tujuan Tertentu</b>																				
54	Paket Pengadaan Barang dan Jasa													1. Menilai ketaatan/Kepatuhan terhadap Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	- Proses Pengadaan Barang dan Jasa dari mulai perencanaan dan Pelaksanaan	Proses Pengadaan Barang dan Jasa	- Risiko terkait Kompleksitas Pengadaan Barang dan Jasa	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	7	7
<b>III. Pemeriksaan Lainnya</b>																				
55	Reviu LKPD													Meyakini LKPD per 31 Desember 2017 telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan berdasarkan	LKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Th.2017, LK SKPD Th 2017	Laporan yang disajikan oleh PPKD, Laporan Keuangan meliputi LRA, Neraca, LO, LPE,	Mempertahankan Opini BPK RI (WTP)	1. Pengumpulan data melalui sampling 2. Analisa dokumen	30	15
56	Evaluasi Lakip													1. Memperoleh Informasi tentang Implementasi SAKIP 2. Menilai tingkat Implementasi SAKIP ; tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government)  Peningkatan Implementasi SAKIP; Memonitor 3. tindaklanjuti rekomendasi 4. Hasil Evaluasi periode sebelumnya	1. Penilaian terhadap perencanaan strategis termasuk didalamnya Perjanjian Kinerja dan sistem pengukuran kinerja 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja 3. Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan 4. Evaluasi terhadap kebijakan SKPD yang bersangkutan	1. Kesesuaian antara Perencanaan dengan pencapaian kinerja 2. Penyajian dan informasi yang dapat di andalkan 3. Program dan kegiatan yang relevan 4. Kebijakan yang mendukung tercapainya kinerja yang	Keselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan pelaporan	1. Penelitian dokumen 2. wawancara/klarifikasi 3. Konsultasi/diskusi	30	15
57	Reviu Rencana Kerja Anggaran Th. 2019													Memberikan Keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar biaya, kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran serta dilengkapi dengan dokumen pendukungnya	Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD Th 2019	Perumusan dan penetapan dokumen Rencana Kerja Anggaran	Keselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan pelaporan	1. Penelitian dokumen 2. wawancara/Klarifikasi 3. Konsultasi/Diskusi	52	15

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2018												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>IV. Pemeriksaan Khusus</b>																			
54	Penanganan Kasus Pengaduan													Memberikan Pendapat atas Hasil Pemeriksaan terhadap Kebijakan, dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan	Pemerintah Kabupaten Cirebon	SKPD/UPKD, dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon	Dengan Penyalahgunaan wewenang, indisipliner, tindakan korupsi	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	6	6

Keterangan :

 Tentatif

BUPATI CIREBON



SUNJAYA PURWADISASTRA